



## Analisis Implementasi Kampung KB (Keluarga Berkualitas) di Kalurahan Bimomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman

Delta Lucyanita, Gerry Katon Mahendra

Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 55292, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: August 22, 2023  
Revised: Nopember 18, 2023  
Available online: March 15, 2024

### KEYWORDS

Implementation, Policy, Health Policy, Quality Family Village

### CORRESPONDENCE

Name: Gerry Katon Mahendra  
E-mail: [gerrykaton@unisayogya.ac.id](mailto:gerrykaton@unisayogya.ac.id)

### A B S T R A C T

Bimomartani Quality Family Village is one of the Family Planning Villages in Sleman Regency. The implementation of this policy is based on supporting the government's efforts to ensure good and quality family planning and reducing the number of unplanned births. In its implementation over the past 2 years, there are still problems, namely lack of facilities, budget and low number of family planning users. This research aims to find out how the Kampung KB program is implemented in Bimomartani Village. This research uses qualitative methods by prioritizing primary data from interviews with informants, with the application of George C. Edward III's theory. Data collection techniques use interviews and observation. The research results show (1) transition communication, clarity of information and consistency are implemented effectively. (2) the disposition shows an attitude of commitment and meets the expectations and incentives provided. (3) The bureaucratic structure has clear SOPs and fragmentation. (4) Resources including facilities, human resources and budget are insufficient.

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang berlebihan menjadikan situasi ini sebagai beban negara. Perkembangan laju penduduk yang tidak terkendali dapat menghambat perkembangan ekonomi nasional, karena populasi angkatan kerja semakin banyak, namun tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Berdasarkan survei sensus BPS, hingga pertengahan tahun 2022 populasi penduduk Indonesia meningkat sekitar 3000 jiwa dibandingkan hasil sensus penduduk tahun 2020. Peningkatan populasi penduduk ini tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduknya yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan Indonesia 1,17%, angka tersebut mengalami penurunan 0,8% dari dua tahun sebelumnya yaitu 1,25% (Badan Pusat Statistik, 2022).

Pertumbuhan penduduk yang berlebihan ini ditanggapi pemerintah sebagai fenomena yang perlu diatur agar sejalan dengan laju pertumbuhan di Indonesia. Dalam UU No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sudah diatur dan dijelaskan bagaimana mengatur tatanan kependudukan dari pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, pengembangan kualitas penduduk, penurunan angka kematian, mobilitas penduduk, dan penduduk rentan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan integrasi dan koordinasi penggunaan kontrasepsi. Program KB diklaim berhasil menurunkan angka laju pertumbuhan penduduk yang diakumulasi dari turunnya angka kematian bayi, jumlah anak per-satu perempuan dan berhasil memperbaiki tingkat kesehatan menurut kepala Bappenas (Bappenas, 2017).

KB atau Keluarga Berencana adalah program yang dikenal dengan dua anak lebih baik ini memiliki peran dalam upaya

mewujudkan keluarga berkualitas melalui promosi, perlindungan dan bantuan dalam hak-hak reproduksi untuk membentuk keluarga dengan usia kawin ideal, mengatur jumlah, jarak kehamilan, membina ketahanan serta kesejahteraan anak. Untuk menyukseskan program KB, KKBPB mengeluarkan inovasi program yaitu Kampung KB.

Kampung KB atau Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu inovasi program dari KKBPB (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) yang bekerja sama dengan lembaga atau kementerian, mitra kerja atau pemangku kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat setingkat desa atau kalurahan. Dalam rangka meningkatkan akseptor KB dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa, Kampung Keluarga Berkualitas hadir untuk mewujudkan tersebut yang di dalamnya terdapat kegiatan untuk meningkatkan sisi ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), dan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Lima kelompok kegiatan tersebut bentuk implementasi dari 8 fungsi keluarga. Kebijakan merupakan tindakan yang disetujui pemerintah, dikeluarkan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada di publik, yang dimaksud adalah masyarakat umum (Anderson et al. 2022).

Program Kampung KB sudah dicanangkan di seluruh Indonesia, hingga tahun 2022 akhir telah terbentuk 19.027 Kampung KB di Indonesia. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk salah satu yang sudah banyak membentuk Kampung KB, hingga tahun 2019 sudah ada 171 Kampung KB yang disahkan (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2017).

Merujuk pada penelitian terdahulu dengan fokus kajian evaluasi program kampung keluarga berencana dari aspek pemberdayaan, meliputi: input, proses, dan output pemberdayaan kampung Keluarga Berencana (Zuhriyah et al., 2017), implementasi program Kampung KB dengan kelompok sasaran keluarga dengan remaja atau Bina Keluarga Remaja (BKR) (Istiadi, 2017), dan implementasi program Kampung KB dalam membentuk karakter masyarakat, sasaran kelompok pada BKR (Bina Keluarga Remaja) (Wahyu Perdana & Suyanto, 2019) mengindikasikan bahwa penelitian mengenai kampung KB menjadi suatu urgensi yang harus terus dipublikasikan. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut pula, penulis mengembangkan kebaruan penelitian difokuskan pada semua kelompok kegiatan Kampung KB dengan menggunakan teori yang lebih relevan serta mengembangkan fokus kajian pada evaluasi program, dampak, kelompok sasaran pada keluarga dengan remaja.

Kalurahan Bimomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman adalah salah satu Kampung KB di Yogyakarta, dibentuk tahun 2018 di Dusun Sorasan dengan nama Kampung KB Dusun Sorasan. Perubahan SK Kepala Desa Bimomartani No.82 Tahun 2020 menjadikan Kampung KB ini setingkat Kalurahan atau Kampung KB Kalurahan Bimomartani.

Kalurahan Bimomartani memiliki kriteria sebagai Kampung KB yaitu rendahnya pengguna KB dan daerah pinggiran. Salah satu indikator luaran dari program Kampung KB adalah meningkatnya kualitas dalam ber-KB yaitu dengan peserta metode kontrasepsi jangka pendek yang menurun dan peserta metode kontrasepsi jangka panjang meningkat (Zuhriyah et al., 2017). Wilayah Kalurahan Bimomartani memiliki 12 Dusun, 27 RW dan 61 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 9.379 jiwa. Memiliki kawasan hijau yang luas serta di daerah pinggir timur Kabupaten Sleman, menjadikan Kalurahan Bimomartani Kampung KB.

Tabel 1. Jumlah Akseptor KB

No	Padukuhuan	Jumlah Akseptor KB							
		Kondom	Pil	Implant	MOP	MOW	IUD	Suntik	Lain-Lain
1.	Krebet	0	0	18	0	1	16	34	0
2.	Rogobangsan	6	7	11	1	7	20	20	0
3.	Kalibulus	2	3	0	0	0	13	13	0
4.	Macanan	3	2	3	1	0	5	10	0
5.	Cokrogaten	21	11	1	1	4	17	42	0
6.	Koroulon Lor	7	10	1	0	1	17	20	0
7.	Pondok Suruh	8	2	2	1	5	12	10	0
8.	Balong	5	1	3	2	9	16	28	0
9.	Banjarharjo	2	0	4	0	4	13	53	0
10.	Kragilan	0	0	1	0	0	6	18	0
11.	Sorasan	19	6	3	0	8	18	24	0
12.	Koroulon Kidul	6	4	0	0	7	12	12	0
Jumlah		79	46	47	6	46	165	284	0
Total		673							

Sumber: Pendataan Keluarga Kalurahan Bimomartani 2021

Berdasarkan tabel 1, jumlah total Pasangan Usia Subur (PUS) 1,168 orang. 678 PUS peserta KB dan 490 bukan peserta KB, dari jumlah total 678 PUS KB aktif, sebanyak 673 PUS sudah menggunakan kontrasepsi modern dan 5 PUS masih menggunakan kontrasepsi tradisional. Metode KB yang paling banyak digunakan yaitu KB suntik sebanyak 284 orang, KB suntik termasuk kontrasepsi jangka pendek karena dilakukan per tiga bulan untuk suntik. Dari data tersebut bisa diketahui jika jumlah pengguna KB kontrasepsi jangka panjang masih rendah.

Dalam Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, dalam Pasaal 21 ayat (1) huruf a (Perpres RI, 2014) dijelaskan jika ada lima kelompok kegiatan yang berguna untuk pembangunan keluarga dalam Kampung KB yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Faktanya, terdapat empat dusun yang belum memiliki sama sekali kelompok kegiatan tersebut.

Dari kedua fenomena kendala tersebut, peneliti tertarik pada implementasi program Kampung KB meliputi kelompok kegiatan yang ada di Kalurahan Bimomartani. Implementasi

kebijakan adalah sebuah konsep yang memiliki beberapa rangkaian tindakan dan faktor pengaruh yang menjadi tolak ukur keberhasilan program (Jumroh and Pratama, 2021). Selama dua tahun program Kampung KB Bimomartani berjalan, penelitian mengenai program Kampung KB di Kalurahan Bimomartani minim dilakukan sehingga capaian program tersebut jarang diketahui.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yaitu penjelasan berupa kalimat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara menggunakan interview guide dan pemilihan informan yang berkompeten berdasarkan kriteria. Narasumber terdiri dari Kepala Bidang Pengendalian Penduduk & KB Dinas DP3AP2KB, Perangkat Kalurahan Bimomartani, Penyuluh Keluarga Berencana Kapanewon Ngemplak, Ketua Kelompok Kerja Kampung KB Bimomartani, Penyuluh Keluarga Berencana Kalurahan Bimomartani dan Ketua Kelompok Kegiatan BKR, BKL, BKB, UPPKS dan PIK-R. Observasi dan dokumentasi sebagai sumber data sekunder berupa foto, kegiatan atau data arsip dokumen yang dimiliki perangkat kalurahan (Hardani et al., 2020). Pada penelitian ini, kasus yang diteliti mengenai

implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas di Kalurahan Bimomartani yang selama 2 tahun ini berjalan. Lokasi penelitian dilakukan di Kalurahan Bimomartani, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Jangka waktu penelitian yang dilakukan dari bulan November hingga bulan Juni.

Proses analisis data yang dilakukan dengan model interaktif meliputi, reduksi data dengan tujuan mempermudah peneliti dalam menyajikan data, penyajian data berguna untuk pemetaan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan, dan penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab apa yang dipertanyakan pada perumusan masalah. Menggunakan teori implementasi Edward III, ada empat faktor yang mempengaruhi berhasilnya sebuah implementasi, yaitu: (1) komunikasi yang baik meliputi transisi, kejelasan informasi dan konsisten; (2) sumber daya yang baik, meliputi SDM tercukupi, adanya fasilitas dan anggaran yang memadai; (3) disposisi atau sikap birokrat atau anggota kelompok yang berkompeten; dan (4) Struktur birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan (Nurdin, 2019). Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pandangan untuk mengambil kebijakan selanjutnya dengan rekomendasi saran yang diberikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kalurahan Bimomartani merupakan salah satu kalurahan yang berada di pinggir kabupaten Sleman dan sudah membentuk beberapa Kelompok Kegiatan di Dusun. Hal ini mendorong pemerintah daerah menjadikan Kalurahan Bimomartani menjadi Kampung KB.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan menganalisis bagaimana Implementasi Kampung KB di Kalurahan Bimomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman. Pada bab ini, peneliti akan membahas hasil wawancara yang diperoleh dari PKB Kapanewon Ngemplak, PKBD Kalurahan Bimomartani, ketua Poktan atau kader di 5 Dusun, Ketua Kampung KB, Staff Kalurahan Bimomartani dan Kabid Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Sleman.

### *Komunikasi*

Komunikasi merupakan penyambung informasi paling cepat. Kejelasan informasi, transisi dan konsisten sangat berpengaruh pada informasi yang diterima masyarakat. Koordinasi komunikasi yang kompak ditunjukkan antara pengelola Kampung KB. Penyampaian informasi dilakukan dengan sosialisasi, penyuluhan atau pembinaan dengan kader setiap dusun di Kalurahan Bimomartani yang didampingi PKB Kapanewon Ngemplak sehingga setiap kader mengerti tujuan, manfaat dan juga sasaran dari program kegiatan Kampung KB. Pembinaan untuk kader ini dilaksanakan di Balai Kalurahan Bimomartani.

Kejelasan Informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentang Kampung KB melalui kelompok kegiatan BKB, BKL, dan BKR. BKB adalah Bina Keluarga Balita yaitu kelompok kegiatan keluarga yang memiliki balita, ibu, ayah, nenek, atau rewang yang ikut mengasuh anak. Kader berperan dalam komunikasi ini sebagai fasilitator. Kader melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dan disertai sarana Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) yaitu bebean dilengkapi modul juga didampingi PKB Kapanewon Ngemplak dalam pertemuan

Poktan ini. Beralih dari hal tersebut ditemukan beberapa warga yang belum mengetahui apa itu Kampung KB. Beberapa masyarakat saat diwawancara seputar pengertian Kampung KB, mereka kesulitan menjawab, tetapi mereka mengikuti Poktan Bina Keluarga Lansia dan Balita.

Konsistensi dari program Kampung Keluarga Berkualitas di Kalurahan Bimomartani sudah baik. Dilakukan pertemuan antara PPKBD dan Sub-PPKBD Kalurahan Bimomartani dengan PKB Kapanewon Ngemplak yang membahas evaluasi, pengumuman dan saran-saran. Pertemuan untuk Kelompok kegiatan konsisten dilakukan sebulan sekali dengan materi yang berbeda setiap pertemuannya.

### *Sumber Daya*

Sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sumber daya materi atau fisik. Ketidakeimbangan sumberdaya bisa berpengaruh dalam sukses tidaknya suatu program. menurut Edward III dalam (Nurdin, 2019), ketidakeimbangan sumber daya yang dimaksud yaitu, kualitas dan kuantitas implementor, fasilitas fisik atau materi yang membantu dan kelompok sasaran yang dituju.

Tabel 2. Tabel Kelompok Kegiatan Kampung KB

No.	Nama Kelompok Kegiatan	Kader
1.	BKB Mangga Dusun Krebet	10
2.	BKR Kasih Ibu Dusun Rogobangsan	9
3.	BKL Sehat Ceria Dusun Kalibulus	5
4.	BKB Melon 1 Dusun Koroulon Lor	5
5.	BKB Melon 2 Dusun Banjarharjo	0
6.	BKB Permata Hati Dusun Sorasan	15
7.	BKL Sehat Sejahtera Dusun Sorasan	15
8.	BKR Harapan Bunda Dusun Sorasan	15

Sumber: Data Kalurahan Bimomartani 2021

Dari tabel 2 menunjukkan jika masih ada beberapa dusun yang kekurangan tenaga kader. Ketua Poktan Dusun Kalibulus dan Poktan Dusun Banjarharjo menyampaikan jika mereka kekurangan kader. Karena banyaknya kegiatan di dusun masing-masing, banyak yang lebih diutamakan dan juga keterbatasan warga yang mau jadi kader sehingga terpaksa Poktan Dusun Kalibulus dan Dusun Banjarharjo tidak aktif dulu. Poktan BKB Dusun Koroulon Lor memiliki 5 kader karena pembentukan Poktan baru sehingga kader masih perlu belajar sambil mencari ibu kader yang mau membantu. Dapat disimpulkan jika jumlah kader mempengaruhi keberlangsungan kegiatan kelompok di dusun.

Kader sebagai fasilitator terdekat dengan masyarakat sudah berkompeten dalam menjalankan tugas mereka sebagai kader di masing-masing Poktan. Dari kalurahan menyediakan pembinaan dan dilakukan monitoring evaluasi setiap bulan. Para kader juga diberi buku modul pendamping penggunaan sarana KIE bebean yang bermacam-macam materi. PKB Kapanewon Ngemplak juga turut membantu, mengawasi langsung saat perkumpulan Poktan.

Sumber daya fisik dan materi sebagai penunjang kebutuhan program Kampung KB. Fasilitas tempat menjadi hal penting dalam kegiatan ini. Tempat yang digunakan untuk melakukan kelompok kegiatan rata-rata di rumah dukuh masing-masing atau di Paud. Seperti Ibu Sri Asih selaku ketua Poktan BKR Kasih Ibu di Dusun Rogobangsan, rumah beliau dijadikan SPS Paud dan juga sering dipakai untuk perkumpulan Poktan. Di

Dusun Sorasan, pertemuan dilakukan di Paud belakang rumah Bapak Jazim selaku Dukuh di Dusun Sorasan dan juga ketua Kampung KB. Fasilitas penunjang kelompok kegiatan yaitu sarana KIE bebean. Setiap Poktan memiliki masing-masing bebean dan dibagi beberapa jilid. Untuk BKL ada bebean ular tangga lansia sehat dan tangguh, ada juga kartu ajaib.

Gambar 1. Gambar bebean



Untuk BKB ada 9 dimensi orang tua hebat, kantong kasih sayang dan kantong wasiat. Untuk BKR ada jalur harta kasih sayang. Penggunaan bebean ini berpedoman pada buku yang dibedah lagi untuk mempermudah penyampaian materi KIE. Di dalam 9 dimensi orang tua hebat dibagi menjadi 3 jilid sebagai inovasi BKB di Kampung KB se-Kapanewon Ngemplak. Gambar di atas adalah satu contoh model bebean jilid 1 lingkaran wasiat menjadi orang tua hebat.

Dana anggaran dituliskan dari dana swadaya masyarakat, tetapi melihat keterbatasan dan kemampuan masyarakat diperlukan dukungan biaya dari sumber legal seperti APBKal. Namun, ditemukan hambatan dalam anggaran ini jika pihak kalurahan belum bisa memberikan prioritas anggaran untuk program Kampung KB. Dikatakan oleh Bapak Agus selaku Pamong Kalurahan Kamituo, jika tahun ini baru bisa memberikan dana 3,8 juta untuk RDKIK sebagai dana operasional Kampung KB dan anggaran lainnya dialihkan untuk mengadakan penyuluhan untuk kader di balai kalurahan sehingga dana berasal dari dana BOKB Kapanewon Ngemplak dan dana swadaya masyarakat. Dapat dikatakan jika sumber daya dalam Kampung KB Bimomartani belum tercukupi. Melihat ada 2 faktor penghambat kinerja kegiatan yaitu jumlah kader dan minimnya anggaran yang ada.

#### Disposisi

Disposisi terdiri dari dua sub-indikator yaitu sikap dan insentif atau motivasi penghargaan. Sikap yang positif berpengaruh pada optimalisasi implementasi kebijakan. Program yang didukung setengah hati seringkali tidak dilaksanakan dengan semangat. Berdasarkan hasil penelitian pengurus, pamong kalurahan, PKB dan kader bekerja dengan senang hati mengelola kampung KB. Hubungan kedekatan antara kader, PKB dengan masyarakat baik dan peduli.

Kepedulian kader akan masalah yang ada di dusun membuat masyarakat sadar jika perlu ada yang mewedahi keluh kesah dan perlu jalan keluarnya melalui pengetahuan-pengetahuan yang didiskusikan. Hal ini selaras dengan pernyataan Hill dan Hupe dalam (Silitonga, 2017) bahwa implementasi berhubungan dengan kebijakan yang detail sebagai respon khusus terhadap masalah-masalah utama dalam masyarakat.

Sikap peduli dan kedekatan kader dengan warga membuat secara tidak langsung program Kampung KB berjalan sesuai harapan dan membawa perubahan perilaku. Dibuktikan dengan ungkapan informan masyarakat jika ibu-ibu kader rutin menghubungi keluarga yang memiliki lansia untuk cek kesehatan dan menanyakan stok obat jika memiliki riwayat darah tinggi atau diabetes. Jika sudah habis, kader akan memberitahu keluarga untuk segera membeli obat atau mengantarkan ke puskesmas.

Sub-indikator lainnya yaitu insentif. Insentif menjadi salah satu saran untuk penunjang semangat kerja implementor dalam bekerja. Kampung KB Bimomartani pernah mendapatkan penghargaan Juara 1 Lomba Desa Unggulan kategori BKB pada tahun 2018. Dari hasil juara tersebut, pengurus mengajak warga liburan sebagai rasa menghargai kerja keras partisipasi selama lomba. Untuk PKB sendiri, insentif yaitu gaji dan tunjangan kinerja sendiri. Kemudian untuk kader disediakan uang transportasi jika datang ke balai untuk ikut pembinaan atau sosialisasi.

#### Struktur Birokrasi

Terdapat dua sub-indikator dalam struktur birokrasi, yaitu SOP atau Standard Operasional Procedure dan Fragmentasi. SOP berperan mengefektifkan kerja adan sebagai pedoman implementor dalam bekerja. Kampung KB Bimomartani masih menggunakan struktur birokrasi yang lama SK Kepala Desa Bimomartani No.82 Tahun 2020 dan menggunakan Peraturan Bupati Sleman No 40.1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Peraturan Bupati tersebut merupakan hasil turunan Inpres No.3 Tahun 2022. Pelaksanaan kampung KB sesuai petunjuk teknis dan Peraturan Bupati Sleman, tapi belum seutuhnya tercapai. Hal ini ditemukan keterbatasan yang diungkapkan pamong kalurahan, yaitu Bapak Agus selaku Kamituo Kalurahan Bimomartani, beliau menyatakan jika belum maksimal karna masih proses penyesuaian perpindahan status kampung KB dari dusun ke Kalurahan dan struktur pengurusnya.

Indikator fragmentasi adalah pembagian tugas, tanggung jawab serta wewenang yang terkait di sektor kebijakan. Pengurus Kampung KB bekerja sesuai jabatan Pokjanya yang ada di SK Kampung KB Kalurahan Bimomartani. Dikawal dinas P3AP2KB untuk bekerja, menyampaikan laporan dan evaluasi ketercapaian target program. PKB bertugas mengawal, mengoordinir kegiatan dan pengurus Kampung KB supaya berjalan sesuai pedoman.

#### KESIMPULAN

Implementasi Kampung Keluarga Berkualitas di Kalurahan Bimomartani dikategorikan belum maksimal, dari empat indikator, satu diantaranya masih ada yang belum maksimal yaitu sumber daya. Empat indikator faktor keberhasilan implementasi menunjukkan komunikasi dari segi transisi dan konsisten sudah baik, namun untuk kejelasan informasi yang diterima masyarakat belum maksimal. Indikator sumber daya

belum maksimal, karena masih ada kekurangan pada jumlah kader dan keterbatasan anggaran untuk kelompok kegiatan. Indikator disposisi menunjukkan sesuai harapan yaitu menyatakan komitmen dan tanpa pamrih. Indikator struktur birokrasi jelas, terdapat SOP dan fragmentasi yang dijalankan. Keterbatasan yang dialami dalam implementasi ini adalah pihak Kalurahan Bimomartani masih tahap proses penyesuaian yang sebelumnya tingkat dusun menjadi kalurahan sehingga belum maksimal dalam pembagian anggaran dan administrasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E., Moyer, J., & Chichirau, G. (2022). *Public policymaking*. Cengage Learning.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. (2017). *Kampung KB* (pp. 1–20). <http://kampungkb.bkkbn.go.id/kampungkb/>
- Badan Pusat Statistik. (2022).
- Bappenas. (2017). *KB Salah Satu Program Family Planning Terbaik di Dunia*.
- Hardani, H., ustiawaty, jumari, Andriani, H., istiqomah, ria, Sukmana, D., Fardani, R., auliya, nur, & Utami, E. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Istiadi, A. (2017). Implementasi program kampung keluarga berencana (studi pada kelompok sasaran keluarga dengan remaja di dusun waung desa sonoageng kecamatan prambon kabupaten nganjuk). *Publika*, 5(4).
- Jumroh, J., & Pratama, Y. J. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik - Repository STIA Bala Putra Dewa*. <http://repository.stiabpd.ac.id/10/>
- Nurdin, H. E. S. (2019). *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik* (Vol. 53, Issue 9).
- Perpres RI. (2014). *Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014, 41*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Silitonga, R. F. (2017). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat*. 1–14.
- Wahyu Perdana, M., & Suyanto, T. (2019). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) dalam Membentuk Karakter Masyarakat di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 376–390.
- Zuhriyah, A., Indarjo, S., Budi, B., Kesehatan, R. P., Perilaku, I., Ilmu, J., & Masyarakat, K. (2017). *Higeia Journal Of Public Health Research and Development Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana* Info Artikel. 1(4), 1–13. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>